

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab V, dapat ditarik kesimpulan akhir yang menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, sebagai berikut.

1. Setelah kebijakan sistem zonasi diberlakukan, pemerataan kesempatan (ekualitas) pendidikan menjadi lebih merata. Anak dengan berbagai latar belakang dan karakteristik dapat masuk ke SMA negeri selama kriteria domisilinya memenuhi jarak untuk persyaratan kebijakan sistem zonasi. SMA negeri unggulan/favorit yang selama ini cenderung hanya menerima anak dengan standar tertentu, kini juga harus menerima anak dengan beragam kemampuan akademis, kondisi sosioekonomi, asal SMP, dan latar belakang pendidikan orang tua yang secara umum lebih rendah daripada ketika kebijakan sistem zonasi belum diberlakukan. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas *input* di SMA negeri unggulan/favorit. Namun, penurunan tersebut hanya sekitar sepertiga dari keseluruhan *input*. SMA negeri unggulan/favorit masih memperoleh *input* yang bagus dari jalur prestasi.

Sebaliknya, SMA negeri bukan unggulan/favorit juga mengalami perubahan *input* siswa. Adanya jalur prestasi menyebabkan SMA negeri bukan unggulan/favorit menerima *input* siswa yang sedikit lebih tinggi daripada ketika kebijakan sistem zonasi belum diberlakukan. Namun, perubahan ini tidak terlalu signifikan.

Dengan demikian, kendati pemerataan kesempatan (ekualitas) pendidikan telah berhasil dicapai dengan adanya kebijakan sistem zonasi, dalam implementasinya pemerataan tersebut tampak belum benar-benar optimal. Salah satu faktor yang

memengaruhinya adalah lokasi geografis sekolah dan komposisi demografi penduduk yang tinggal di sekitar sekolah.

SMA negeri unggulan/favorit berlokasi di wilayah dengan banyak perumahan elite dan dikelilingi oleh SMP-SMP yang juga berstatus unggulan/favorit. Hal ini menyebabkan *input* siswa dari jalur zonasi di SMA negeri unggulan/favorit menjadi tidak terlalu rendah. Sebaliknya, SMA negeri bukan unggulan/favorit berlokasi di perumahan bagus, tetapi dekat dengan perkampungan kumuh. Di sekitarnya pun kebanyakan SMP yang biasa-biasa saja, bukan SMP unggulan/favorit. Kondisi ini menyebabkan anak yang masuk melalui jalur zonasi ke SMA negeri bukan unggulan/favorit memiliki karakteristik kemampuan akademis, kondisi sosioekonomi, asal SMP, dan latar belakang pendidikan orang tua yang cenderung lebih rendah daripada karakteristik anak yang masuk melalui jalur zonasi ke SMA negeri unggulan/favorit.

Komposisi demografi penduduk di sekitar sekolah juga sangat memengaruhi pemerataan. Penduduk yang tinggal di sekitar SMA negeri unggulan/favorit dan SMA negeri bukan unggulan/favorit mengikuti komposisi umum demografi Kota Surabaya, yang kebanyakan bersuku Jawa dan beragama Islam. Hal ini menyebabkan sebagian besar siswa yang masuk melalui jalur zonasi ke SMA negeri unggulan/favorit maupun ke SMA negeri bukan unggulan/favorit kebanyakan juga bersuku Jawa dan beragama Islam. Kondisi ini tidak bisa diartikan sebagai tidak terjadinya pemerataan, melainkan karena komposisi demografi penduduknya memang seperti itu.

2. Setelah kebijakan sistem zonasi diberlakukan, kualitas pendidikan tidak serta-merta menjadi lebih merata. Dari aspek dimensi kualitas sebagai reputasi, tidak terjadi perubahan citra sekolah setelah kebijakan sistem zonasi diberlakukan. Kendati

pemerintah hendak menghapuskan predikat “unggulan/favorit” dengan kebijakan sistem zonasi, kenyataannya label itu masih melekat di sekolah-sekolah. Masyarakat masih menginginkan putra-putrinya masuk ke sekolah yang sejak dulu memiliki predikat unggulan/favorit dan merasa kecewa ketika anaknya terpaksa masuk ke sekolah bukan unggulan/favorit.

Dari aspek kualitas sebagai *input* sumber daya, baik SMA negeri unggulan/favorit maupun SMA negeri bukan unggulan/favorit sama-sama mengalami perubahan *input* siswa akibat kebijakan sistem zonasi sekolah, meskipun kadar efek yang dirasakan berbeda. SMA negeri unggulan/favorit lebih merasakan dampak perubahan tersebut, dengan masuknya anak-anak yang berkemampuan akademis tidak tinggi. Guru-guru di SMA negeri unggulan/favorit harus bekerja lebih keras untuk mengajar anak-anak tersebut.

Sementara di SMA negeri bukan unggulan/favorit, perubahan *input* siswa dari segi kemampuan akademis juga terjadi. Namun, perubahan tersebut tidak terlalu signifikan bagi para guru, kecuali untuk beberapa kasus ekstrem. Hal ini disebabkan kondisi *input* siswa di SMA negeri bukan unggulan/favorit sudah beragam sebelum kebijakan sistem zonasi sekolah diberlakukan. Perubahan yang banyak terjadi justru dalam hal *attitude* siswa yang masuk dari jalur zonasi. SMA negeri bukan unggulan/favorit banyak menghadapi kasus kesiswaan yang terjadi akibat perubahan *input* dari kebijakan sistem zonasi, antara lain adanya “gerombolan sekampung” yang merasa berkuasa di sekolah, perundungan, serta perilaku yang kurang baik.

Dari aspek kualitas sebagai proses, SMA negeri unggulan/favorit dan SMA negeri bukan unggulan/favorit memiliki perbedaan dalam “mengolah” perubahan *input* siswa yang terjadi akibat kebijakan sistem zonasi sekolah. Proses belajar mengajar di SMA negeri unggulan/favorit dikondisikan secara ketat dengan iklim kompetisi yang tinggi

sejak awal karena pihak sekolah bertekad untuk menjaga agar *output*-nya tetap sesuai standar. Anak-anak yang berkemampuan akademis agak rendah dari jalur zonasi dipersilakan untuk mengundurkan diri dan pindah ke sekolah lain jika merasa tidak mampu mengikuti pelajaran.

Sementara di SMA negeri bukan unggulan/favorit, proses belajar mengajarnya dapat dikatakan tidak seketat di SMA negeri unggulan/favorit. Iklim pembelajaran di SMA negeri bukan unggulan/favorit lebih santai, tanpa adanya kompetisi tinggi antarsiswa. Terlebih lagi, perubahan *input* di SMA negeri bukan unggulan/favorit tidak sedrastis di SMA negeri unggulan/favorit. Dengan demikian, secara umum proses “pengolahan” *input* yang dilakukan guru di SMA negeri bukan unggulan/favorit cenderung sama seperti tahun-tahun sebelum kebijakan sistem zonasi diberlakukan. Hanya untuk beberapa kasus perubahan *input* kemampuan akademis yang sangat ekstrem saja yang membuat guru harus lebih bekerja keras.

Dari segi kualitas sebagai konten, baik SMA negeri unggulan/favorit maupun SMA negeri bukan unggulan/favorit sama-sama menggunakan kurikulum terkini. Namun, keduanya menganut sistem pembelajaran yang tidak sama. Perbedaan sistem pembelajaran ini sangat memengaruhi proses belajar mengajar secara keseluruhan, terutama setelah terjadi perubahan *input* siswa akibat kebijakan sistem zonasi.

SMA negeri unggulan/favorit menggunakan sistem SKS. Sistem ini menitikberatkan pada kemampuan individu siswa dan tidak mengenal kenaikan kelas. Siswa dapat mengendalikan sendiri laju kecepatan belajarnya sehingga dia bisa lulus 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 4 sampai 5 tahun. Dengan adanya sistem ini, siswa di kelas dikelompokkan berdasarkan kemampuan akademisnya dan guru harus mengajarkan materi yang berbeda-beda sesuai dengan *progress* masing-masing

kelompok tersebut. Siswa yang belum mencapai nilai tuntas minimal (KKM) belum bisa beranjak ke materi berikutnya.

Sementara SMA negeri bukan unggulan/favorit masih menggunakan sistem reguler yang menjalankan kenaikan kelas seperti biasa. Sistem reguler ini lebih memiliki banyak toleransi kepada siswa, terlebih lagi dengan adanya anjuran dari pemerintah agar tidak ada siswa yang tinggal kelas jika tidak ada kasus ekstrem (kriminal, narkoba, dsb). Pada akhirnya guru harus tetap memberikan nilai KKM agar siswa tetap bisa naik kelas, walaupun kenyataannya siswa tersebut belum benar-benar menguasai materi.

Dari segi kualitas sebagai *output*, sejauh ini belum terjadi perubahan *output* yang sangat signifikan meskipun kebijakan sistem zonasi telah diberlakukan dan sekolah-sekolah telah mengalami perubahan *input*. SMA negeri unggulan/favorit yang menjadi peringkat satu sebelum kebijakan sistem zonasi masih tetap memegang peringkat satu setelah kebijakan sistem zonasi.

Perubahan *input* siswa akibat kebijakan sistem zonasi menyebabkan SMA negeri mengalami penurunan *output* berupa nilai, sementara SMA negeri bukan unggulan/favorit tidak. Hal ini dipengaruhi oleh target *output* dan sistem pembelajaran yang digunakan sekolah. SMA negeri unggulan/favorit menargetkan *output* tinggi untuk menjaga reputasi dan menerapkan sistem SKS yang tidak mengenal kenaikan kelas sehingga nilai siswa benar-benar harus merupakan hasil kerja siswa itu sendiri. Sebaliknya, target *output* SMA negeri bukan unggulan/favorit tidak “muluk-muluk”, hanya agar nilai siswa lebih baik dari *input*-nya. SMA negeri bukan unggulan/favorit juga masih menggunakan sistem reguler yang mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak membuat anak tinggal kelas sehingga guru harus tetap memberikan nilai KKM agar anak bisa naik kelas. Dengan demikian, tingkat kenaikan kelas di SMA negeri

bukan unggulan/favorit tetap 100% meskipun ada anak-anak dari jalur zonasi yang berkemampuan akademis sangat rendah.

Dari segi kualitas sebagai nilai tambah, baik SMA negeri unggulan/favorit maupun SMA negeri bukan unggulan/favorit sama-sama memiliki aneka cara untuk memberikan pendidikan yang membentuk kepribadian siswa dengan menanamkan sikap dan nilai-nilai yang baik. Namun, pendekatan yang digunakan kedua sekolah berbeda. Guru-guru SMA negeri unggulan/favorit menggunakan pendekatan persuasif dengan iming-iming *reward and punishment* yang bisa berpengaruh ke nilai pelajaran. Sementara guru-guru SMA negeri bukan unggulan/favorit menggunakan pendekatan humanistik dengan berusaha untuk lebih bisa merangkul siswa melalui petuah dan contoh.

3. Target reformasi kebijakan pendidikan yang ingin dicapai pemerintah melalui kebijakan sistem zonasi adalah pemerataan distribusi akses dan layanan pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerataan distribusi akses pendidikan sudah berhasil dipenuhi oleh kebijakan sistem zonasi, tetapi pemerataan distribusi layanan pendidikan belum.

Pemerataan distribusi akses pendidikan dapat dikatakan sudah berhasil dipenuhi karena pemerataan kesempatan (ekualitas) juga sudah tercapai. Anak dari berbagai latar belakang kini memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke SMA negeri. Sekolah negeri unggulan/favorit juga merasa diuntungkan dengan adanya kebijakan sistem zonasi. Kondisi ini merupakan titik awal yang baik untuk target reformasi jangka panjang pemerintah yang ingin meningkatkan pemerataan pendidikan.

Namun, pemerataan ini menimbulkan implikasi-implikasi lain. Salah satu yang paling signifikan adalah timbulnya kesenjangan internal di antara siswa SMA negeri,

terutama di SMA negeri unggulan/favorit. Terdapat *gap* kemampuan akademis dan kondisi sosioekonomi yang cukup jauh antara siswa yang masuk melalui jalur zonasi dengan siswa yang masuk melalui jalur prestasi. Hal ini tentunya menjadi tantangan baru bagi sekolah.

Sementara itu, pemerataan distribusi layanan pendidikan dapat dikatakan belum berhasil dipenuhi karena tiga hal, yaitu kurangnya jumlah SMA negeri, persebaran SMA negeri yang belum merata, serta masih adanya kesenjangan sarana prasarana dan fasilitas antara SMA negeri unggulan/favorit dengan SMA negeri bukan unggulan/favorit. Di Kota Surabaya, jumlah SMA negeri yang hanya 22 dan lokasi persebarannya yang belum merata mengakibatkan kekurangan akomodasi kebutuhan SMA negeri untuk 31 kecamatan. Banyak anak yang tidak bisa masuk ke SMA negeri karena di sekitar rumahnya tidak ada SMA negeri yang dekat. Sebaliknya, anak yang rumahnya di luar kota malah bisa bersekolah di SMA negeri di Surabaya karena Kartu Keluarga-nya beralamat di Surabaya.

Kurangnya jumlah SMA negeri serta persebaran lokasinya yang tidak merata menyebabkan banyak masalah dalam implementasi kebijakan sistem zonasi. Target reformasi pendidikan melalui kebijakan sistem zonasi untuk distribusi layanan pendidikan tidak dapat sepenuhnya dicapai apabila institusi pendidikan yang memberikan layanan pendidikan saja tidak merata.

Selain itu, masih ada kesenjangan sarana prasarana dan fasilitas antara SMA negeri unggulan/favorit dengan SMA negeri bukan unggulan/favorit. Kesenjangan ini timbul salah satunya karena perbedaan latar belakang Komite Sekolah yang membantu sekolah dalam penyediaan sarpras dan fasilitas. Komite Sekolah di SMA negeri unggulan/favorit kebanyakan berasal dari keluarga dengan latar belakang sosioekonomi tinggi sehingga memiliki sumber daya finansial dan koneksi yang lebih

memadai untuk membantu sekolah dalam penyediaan sarpras dan fasilitas. Sebaliknya, Komite Sekolah di SMA negeri bukan unggulan/favorit kebanyakan berasal dari latar belakang sosioekonomi yang cenderung menengah ke bawah sehingga tidak bisa sepenuhnya membantu sekolah dalam penyediaan sarpras dan fasilitas.

6.2 Implikasi

Penelitian ini mempunyai dua implikasi, yaitu implikasi teoretis dan implikasi praktis. Implikasi teoretis berkaitan dengan bagaimana dan apa implikasi penelitian ini sehingga bisa menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan, terutama teori dan penelitian di bidang kebijakan publik. Sementara implikasi praktis berhubungan dengan bagaimana dan apa implikasi penelitian ini sehingga bisa menjadi referensi terapan bagi praktisi di bidang kebijakan publik, khususnya di bidang kebijakan pendidikan.

6.2.1 Implikasi Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang kebijakan publik, khususnya kebijakan pendidikan, reformasi kebijakan pendidikan, dan evaluasi kebijakan; serta di bidang pendidikan secara umum, terutama untuk topik ekualitas dan kualitas pendidikan yang belum ditemukan di penelitian-penelitian bidang pendidikan di Indonesia.

Dalam bidang topik pendidikan di Indonesia, penelitian ini mengonfirmasi sekaligus tidak mengonfirmasi temuan-temuan dari dua penelitian terdahulu mengenai pendidikan di Indonesia yang menjadi acuan penelitian ini. Selain itu, mengingat kedua penelitian terdahulu tersebut bukan penelitian kebijakan, penelitian ini memperkaya

penelitian mengenai pendidikan di Indonesia dengan memberikan hasil penelitian dalam koridor kebijakan publik.

Dalam bidang topik kebijakan sistem zonasi sekolah, penelitian ini memberikan temuan-temuan baru terkait dampak kebijakan sistem zonasi sekolah di sekolah negeri unggulan/favorit dan di sekolah negeri bukan unggulan/favorit, juga memberikan hasil evaluasi mengenai kebijakan sistem zonasi sekolah sebagai suatu reformasi kebijakan pendidikan. Penelitian ini juga mengonfirmasi hasil beberapa penelitian terdahulu mengenai kebijakan sistem zonasi sekolah dan tidak mendukung satu temuan penelitian terdahulu mengenai kebijakan sistem zonasi sekolah.

Adapun dalam bidang topik ekualitas dan kualitas pendidikan, penelitian ini menyajikan kebaruan dalam tiga aspek, sebagaimana yang telah disebutkan pada Subbab 2.1.3. Pada aspek pertama, yaitu aspek unik terkait negara lokasi penelitian dengan kebijakan dan kondisi pendidikannya, penelitian ini memberikan temuan baru mengenai dampak kebijakan zonasi sekolah sebagai kebijakan pendidikan lokal di Indonesia terhadap ekualitas dan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa temuan dalam penelitian ini mengonfirmasi penelitian-penelitian terdahulu mengenai ekualitas dan kualitas pendidikan, tetapi ada juga yang tidak mengonfirmasi karena perbedaan kebijakan, kondisi, dan sistem pendidikan antara negara-negara lain tersebut dengan Indonesia. Dengan demikian, sebagaimana penelitian-penelitian ekualitas dan kualitas pendidikan yang lainnya, penelitian ini juga menyajikan kekhasan dari negara lokasi penelitian, yaitu Indonesia.

Pada aspek kedua, yaitu aspek metodologi, penelitian ini menyajikan temuan berdasarkan hasil analisis menggunakan *mixed methods*. Tidak seperti penelitian-penelitian ekualitas dan kualitas pendidikan lain yang kebanyakan merupakan

penelitian kuantitatif yang melakukan analisis statistik data sekunder, penelitian ini menganalisis data primer untuk aspek ekualitas dengan statistik deskriptif sederhana dan menganalisis data primer untuk aspek kualitas yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan dalam hal metodologi yang bisa menjadi inspirasi untuk penelitian-penelitian ekualitas dan kualitas pendidikan di masa mendatang.

Pada aspek ketiga, yaitu aspek indikator dimensi, beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini juga telah digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu mengenai ekualitas dan kualitas pendidikan. Ketika hasil analisis dari indikator-indikator yang sama tersebut dibandingkan, ada indikator yang menghasilkan temuan yang sama, tetapi ada juga yang menghasilkan temuan berbeda. Hal ini terkait dengan aspek pertama, yang mana penelitian mengenai ekualitas dan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi pendidikan di negara lokasi penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga menyajikan hasil analisis dan temuan pada indikator-indikator berbeda yang belum pernah digunakan pada penelitian ekualitas dan kualitas pendidikan sebelumnya. Hasil tersebut dapat memberikan pengetahuan baru mengenai aspek-aspek ekualitas dan kualitas yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan dapat mengisi *gap* pada studi-studi terdahulu mengenai kebijakan sistem zonasi sekolah dan mengenai ekualitas dan kualitas pendidikan. Ke depannya, penelitian ini juga bisa menjadi inspirasi bagi peneliti-peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa di lokasi (negara/kota/sekolah) yang berbeda.

6.2.2 Implikasi Praktis

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian evaluasi terapan sehingga diharapkan bisa memberikan implikasi praktis yang cukup banyak. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi para *stakeholder* di bidang kebijakan, bidang pendidikan, maupun bidang kebijakan pendidikan untuk mengetahui bagaimana pencapaian kebijakan sistem zonasi sebagai suatu reformasi kebijakan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan ilmiah bagi para pembuat kebijakan yang merumuskan kebijakan sistem zonasi sekolah, sebab penelitian ini memuat hasil evaluasi terhadap pencapaian target, dampak, serta implikasi yang ditimbulkan oleh kebijakan sistem zonasi sekolah, yang ditinjau dari segi pemerataan kesempatan (ekualitas) dan kualitas. Kendati lokasi penelitian ini hanya mencakup satu kota dan dua sekolah saja, diharapkan agar penelitian ini tetap bisa menjadi acuan ilmiah yang bisa menggambarkan penerapan kebijakan sistem zonasi secara umum. Penelitian ini juga dapat menjadi bacaan atau penambah wawasan bagi praktisi pendidikan secara umum yang memiliki ketertarikan terhadap kebijakan pendidikan, khususnya kebijakan sistem zonasi. Adapun uraian dalam penelitian ini mengenai cara-cara yang dilakukan para guru di SMA negeri unggulan/favorit maupun di SMA negeri bukan unggulan/favorit untuk “mengolah” *input* siswa yang berubah akibat kebijakan sistem zonasi juga dapat menjadi inspirasi bagi guru-guru lainnya. Barangkali ada cara-cara tersebut yang bisa diterapkan dalam situasi dan kondisi masing-masing.

6.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi, terdapat beberapa rekomendasi yang bisa peneliti ajukan:

1. Target reformasi untuk pemerataan distribusi layanan pendidikan tidak akan bisa tercapai dengan sempurna jika jumlah dan persebaran institusi pendidikan yang akan memberikan layanan pendidikan masih kurang dan tidak merata. Oleh karenanya, pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, perlu mencari cara untuk mengatasi ketidakmerataan persebaran lokasi SMA negeri di Surabaya, yang berimplikasi pada masalah-masalah dalam penerapan kebijakan sistem zonasi. Jika memungkinkan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dapat mempertimbangkan untuk menambah jumlah sekolah dengan membangun SMA negeri baru di kecamatan yang belum ada SMA negerinya. Setidaknya, masing-masing kecamatan di Surabaya perlu memiliki satu SMA negeri sehingga tidak ada anak yang merasa kesulitan masuk ke SMA negeri karena di dekat rumahnya tidak ada SMA negeri.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga hendaknya lebih meningkatkan upaya untuk menyetarakan sarana prasarana dan fasilitas SMA negeri. Jika sarana prasarana dan fasilitas SMA negeri secara umum sudah setara, masyarakat tidak akan terlalu keberatan untuk masuk ke SMA negeri mana pun, walaupun SMA negeri tersebut tidak berstatus unggulan/favorit.
3. Jika memungkinkan, pihak SMAN 14 (dan sekolah bukan unggulan/favorit lainnya yang mengalami masalah serupa) hendaknya mencari cara kreatif lain, misalnya dengan menjalin kerja sama dengan CSR perusahaan tertentu, untuk meningkatkan sarana prasarana dan fasilitasnya agar bisa mengakomodasi kebutuhan siswa yang beragam, tidak hanya mengandalkan bantuan dari Dinas Pendidikan dan Komite Sekolah saja.